

**DAMPAK PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
DI KELURAHAN RANOTANA WERU KECAMATAN WANEA
KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA**

Imanuel Anugerah Korompis
NPP. 31.0889

Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: 31.0889@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dwi Indah Kartika. S.Pd.. M.Si

ABSTRACT

Problem Statement: *The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is a government policy aimed at reducing the expenditure burden of poor households through non-cash food assistance. However, its implementation in Ranotana Weru Sub-district, Wanea District, Manado City, still faces several challenges, such as inaccurate targeting, delayed distribution, and limited socialization to beneficiary households.* **Purpose:** *This study aims to evaluate the implementation of the BPNT program and analyze its social and economic impacts on the Beneficiary Families (KPM).* **Method:** *This study employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm to explore the implementation and impact of the BPNT (Non-Cash Food Assistance) program on social welfare in Ranotana Weru Sub-district. The conceptual framework is based on Midgley's Social Welfare Theory and the Van Meter and Van Horn policy implementation model. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, using triangulation techniques to ensure validity. A total of 28 informants were involved, including the Head of the Manado City Social Service, the Head of the Community Empowerment Division, the Wanea Sub-district Head, the Ranotana Weru Village Head, the BPNT City Coordinator, three BPNT agent kiosk distributors, and 20 beneficiary community members. The key informant was the Head of the Manado City Social Service, chosen for their strategic role in formulating policy, managing, and supervising the implementation of the BPNT program at the city level. Informants were selected purposively to gain comprehensive insights from policy makers to program beneficiaries.* **Result:** *The results showed that the implementation of BPNT in Ranotana Weru has not fully met the standards of accurate targeting, timely distribution, and quality delivery. Social impacts observed include improved food availability and enhanced relationships between the community and local government. Economic impacts include increased household spending efficiency and higher income for local agents.* **Conclusion:** *the BPNT program provides real benefits to the community, but improvements are needed in coordination, recipient data accuracy, and distribution efficiency. Local governments are expected to enhance monitoring mechanisms and provide continuous training to all implementing actors to ensure that the program's goals are optimally achieved.*

Keywords: BPNT, program implementation, social impact, economic impact, Ranotana Weru.

ABSTRAK

Permasalahan: Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan pangan. Namun, pelaksanaan program ini di Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat penerima. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program BPNT serta menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik untuk memahami implementasi dan dampak program BPNT terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Ranotana Weru. Kerangka konseptual yang digunakan adalah Teori Kesejahteraan Sosial Midgley serta model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas. Informan dalam penelitian ini berjumlah 28 orang, terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Manado, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Camat Wanea, Lurah Ranotana Weru, Koordinator BPNT Kota Manado, tiga agen kios penyalur BPNT, dan 20 masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial dipilih sebagai informan kunci karena perannya yang strategis dalam merumuskan kebijakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan BPNT di tingkat kota. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk memperoleh pandangan yang komprehensif dari pihak pengambil kebijakan hingga penerima manfaat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ranotana Weru belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Selain itu, dampak sosial yang dirasakan antara lain peningkatan ketersediaan pangan dan hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah. Dampak ekonomi yang timbul mencakup meningkatnya efisiensi pengeluaran rumah tangga dan bertambahnya pendapatan agen lokal. **Kesimpulan:** Program BPNT memberi manfaat nyata bagi masyarakat, namun pelaksanaannya perlu perbaikan terutama dalam aspek koordinasi, akurasi data penerima, dan efektivitas distribusi. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh pelaksana program agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: BPNT, pelaksanaan program, dampak sosial, dampak ekonomi, Kelurahan Ranotana Weru.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang terus dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia memandang kemiskinan sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan berkelanjutan dan strategis, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1), bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warga negara. Dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan bahan pangan yang disalurkan secara non-tunai. Namun, efektivitas BPNT tidak hanya diukur dari sisi pelaksanaannya, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Dampak sosial mencakup peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat, sedangkan dampak ekonomi mencerminkan sejauh mana program ini mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat daya tahan finansial keluarga miskin. Penduduk miskin umumnya memiliki karakteristik khusus, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, tinggal di wilayah marginal, akses terbatas terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar, serta rendahnya pemanfaatan teknologi. BPS (2025) mencatat bahwa kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga merambah wilayah perkotaan. Secara nasional, tren penurunan angka kemiskinan dari tahun 2020 hingga 2024 memang terlihat menurun, seperti ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
2020	27,51
2021	26,22
2022	25,84
2023	25,33
2024	24,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Meski menurun, capaian ini masih belum memenuhi target pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 18–21 juta jiwa pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan masih berjalan lambat dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif serta berkelanjutan. Masalah kemiskinan

bukan sekadar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, melainkan juga menyangkut keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial. Kemiskinan menciptakan lingkaran setan: ketidakmampuan ekonomi menurunkan kualitas SDM, yang berdampak pada sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga akhirnya menciptakan pengangguran dan memperkuat kemiskinan struktural. Di Provinsi Sulawesi Utara, kemiskinan masih menjadi isu utama. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara (2025), jumlah penduduk miskin pada tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Meskipun angka kemiskinan provinsi ini sempat menurun, tetapi dinamika ini menunjukkan belum stabilnya pencapaian target pengentasan kemiskinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berikut ini data jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020–2024

NO	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Boolang Mongondow	18,07	19,08	17,96	19,02	18,97	6,42	6,75	6,56	6,85	6,79
2	Minahasa	24,95	26,30	24,34	23,86	23,61	8,52	9,15	8,53	8,62	8,59
3	Sangihe	14,64	14,55	13,89	14,60	14,54	5,07	5,14	5,08	5,21	5,18
4	Talaud	8,84	8,37	7,72	7,97	7,88	3,10	3,05	2,98	3,15	3,12
5	Minsel	19,38	19,77	19,07	18,90	18,86	6,75	6,90	6,82	6,85	6,99
6	Minut	14,33	14,49	13,50	13,66	13,62	5,02	5,12	4,94	5,09	5,06
7	Bolmut	6,82	6,53	6,01	6,56	6,47	2,31	2,23	2,15	2,35	2,32
8	Sitaro	5,95	6,00	5,53	5,92	5,80	2,06	2,10	2,00	2,20	2,18
9	Mitra	13,73	13,31	12,61	12,70	12,64	4,68	4,83	4,61	4,91	4,89
10	Bolsel	8,53	8,63	8,10	8,28	7,99	3,00	3,10	2,97	3,15	3,12
11	Boltim	4,30	4,47	4,32	4,32	4,26	1,51	1,59	1,55	1,52	1,54
12	Kota Manado	25,55	26,78	25,38	25,17	24,95	8,97	9,36	9,15	9,03	8,95
13	Kota Bitung	14,18	14,33	14,00	15,00	14,81	5,11	5,21	5,13	5,30	5,26

14	Kota Tomohon	6,06	6,18	5,79	6,24	6,15	2,10	2,15	2,05	2,25	2,18
15	Kota Kotamobagu	7,06	7,56	6,94	6,82	6,73	2,42	2,53	2,50	2,55	2,54
Sulawesi Utara		192,37	196,35	185,14	189,00	187,28	66,11	70,25	67,38	70,55	68,71

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2025

Sebagai contoh, Kota Manado merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Program seperti BPNT sudah diterapkan, namun berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti pendataan yang kurang akurat, distribusi bantuan yang belum merata, serta rendahnya kapasitas penerima dalam memanfaatkan bantuan secara produktif. Salah satu wilayah yang mencerminkan kondisi ini adalah Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Selain itu, kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian utama, di mana sebagian masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Pemerintah Kota Manado telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 214 Tahun 2024 untuk menetapkan sasaran keluarga miskin penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Miskin Tiap Kelurahan Kecamatan Wanea Tahun 2020–2024

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk miskin				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Wanea	204	229	231	238	235
2	Tanjung Batu	249	267	257	288	286
3	Pakowa	255	273	253	294	289
4	Bumi Nyiur	318	325	322	322	318
5	Ranotana Weru	352	371	349	343	339
6	Teling Atas	338	352	326	332	328
7	Tingkulu	273	292	288	304	301
8	Karombasan Utara	266	284	264	296	289

9	Karombasan Selatan	304	322	300	288	284
Jumlah		2.566	2.722	2.590	2.705	2.671

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, 2024

Beberapa penelitian internasional memberikan gambaran yang relevan terkait efektivitas program subsidi pangan dan bantuan sosial. Yi et al. (2015) menunjukkan bahwa program subsidi pangan di China mampu meningkatkan luas lahan tanam melalui pelonggaran keterbatasan likuiditas rumah tangga, yang secara langsung dapat meningkatkan ketahanan pangan. Ini mengindikasikan pentingnya dukungan finansial dalam meningkatkan produktivitas pertanian, yang dapat menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan di Indonesia. Harnack et al. (2016) mengungkapkan bahwa program dengan kombinasi insentif dan pembatasan dalam bantuan pangan mampu mengubah pola konsumsi ke arah yang lebih sehat, seperti pengurangan konsumsi kalori berlebih dan peningkatan asupan buah. Temuan ini relevan untuk BPNT yang berfokus pada penyediaan bahan pangan berkualitas, sehingga selain meningkatkan kuantitas, juga memperbaiki kualitas gizi masyarakat miskin. Dalam konteks negara maju, Black et al. (2012) melalui tinjauan sistematis program subsidi pangan seperti WIC di Amerika Serikat menemukan peningkatan konsumsi makanan bergizi di kalangan ibu hamil dan bayi. Ini menegaskan bahwa program subsidi pangan dapat memiliki dampak positif kesehatan yang signifikan, meskipun perlu disesuaikan dengan konteks lokal di Indonesia yang memiliki tantangan demografis dan geografis berbeda. Masalah kebocoran dan ketidakefisienan distribusi bantuan pangan seringkali menjadi kendala pelaksanaan program. Banerjee et al. (2018) menemukan bahwa pemberian kartu identitas program secara langsung ke penerima di Indonesia dapat meningkatkan penerimaan bantuan hingga 26% tanpa mengurangi alokasi untuk yang berhak, sehingga mengurangi kebocoran program. Ini menyoroti pentingnya transparansi dan mekanisme pelaksanaan yang akuntabel dalam memperkuat efektivitas BPNT. Namun, pengalaman program subsidi pangan di wilayah terpencil juga menunjukkan berbagai tantangan. Studi Galloway (2014, 2017) terkait program Nutrition North Canada mengindikasikan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, subsidi pangan tidak selalu diteruskan secara penuh kepada konsumen dan kurang mampu menurunkan harga makanan secara konsisten. Hal ini menggambarkan perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dalam pelaksanaan BPNT, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur dan akses pasar yang terbatas seperti di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, bentuk-bentuk bantuan pangan lain seperti program backpack food assistance (Shanks & Harden, 2016) menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kemitraan komunitas dan keberlanjutan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hal ini relevan bagi pelaksanaan BPNT yang harus melibatkan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam situasi krisis kemanusiaan seperti di Idleb, Suriah, Doocy et al. (2017) menemukan bahwa bantuan makanan dalam bentuk transfer tunai (voucher) lebih cost-efficient dan efektif dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga dibandingkan bantuan pangan langsung, meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan model bantuan sosial pangan di Indonesia agar lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat miskin. Secara keseluruhan, data yang ditampilkan menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang masih berjalan lambat dan belum stabil di tingkat nasional dan provinsi seperti Sulawesi Utara. Program BPNT sebagai salah satu solusi utama perlu ditingkatkan efektivitasnya melalui pembelajaran dari berbagai studi internasional di atas, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, kualitas bahan pangan, dan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat miskin.

Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun program bantuan sosial seperti BPNT telah dijalankan, efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kajian terhadap pelaksanaan dan dampak BPNT perlu dilakukan secara mendalam untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program bantuan sosial seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu strategi penting pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Berbagai studi internasional telah menunjukkan bahwa program subsidi pangan dapat berdampak positif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas konsumsi, seperti yang ditunjukkan oleh Yi et al. (2015) yang menekankan pentingnya dukungan finansial dalam meningkatkan produktivitas pertanian, serta Harnack et al. (2016) yang mengungkapkan peran insentif dalam mengubah pola konsumsi menuju gizi yang lebih sehat. Selain itu, Black et al. (2012) menegaskan bahwa program subsidi pangan dapat meningkatkan konsumsi makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan bayi. Temuan-temuan ini secara konseptual relevan sebagai landasan untuk memahami potensi BPNT dalam konteks Indonesia. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih berfokus pada wilayah dengan populasi miskin besar dan aspek teknis program, seperti di Pulau Jawa dan Sumatera, tanpa memberikan gambaran mendalam tentang dinamika sosial-ekonomi penerima bantuan di tingkat kelurahan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Ini menjadi celah penting karena kondisi geografis, infrastruktur, dan karakteristik sosial-ekonomi di daerah seperti Kelurahan Ranotana Weru, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sangat berbeda dan menuntut pendekatan pelaksanaan yang lebih kontekstual. Masalah kebocoran dan ketidakefisienan distribusi bantuan yang ditemukan oleh Banerjee et al. (2018) di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan BPNT perlu transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik agar bantuan sampai pada penerima yang berhak. Studi Galloway (2014, 2017) menambah bahwa tanpa pengawasan yang ketat, subsidi pangan tidak selalu menurunkan harga atau meningkatkan akses pangan secara merata, terutama di wilayah dengan infrastruktur pasar terbatas—situasi yang juga relevan di Sulawesi Utara. Selain itu, Shanks & Harden (2016) menggarisbawahi pentingnya kemitraan komunitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memastikan keberlanjutan program bantuan pangan, sesuatu yang masih jarang diangkat dalam studi BPNT di daerah ini. Sementara Doocy et al. (2017) menunjukkan efektivitas transfer tunai dalam konteks krisis kemanusiaan, hal ini mengindikasikan perlunya inovasi model distribusi bantuan yang bisa diterapkan pada konteks lokal untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas penggunaan bantuan. Oleh karena itu, penelitian tentang pelaksanaan dan

dampak BPNT di Kelurahan Ranotana Weru sangat penting untuk mengisi kesenjangan pemahaman ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana efektivitas program, ketepatan sasaran, serta dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh penerima manfaat, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam distribusi bantuan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang sesuai untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan BPNT di wilayah perkotaan Indonesia Timur yang memiliki karakteristik unik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah mengeksplorasi efektivitas dan implementasi program bantuan sosial, khususnya bantuan tunai maupun non-tunai, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Studi oleh Agustina dan Hendra (2021) meneliti implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT berjalan lancar dengan keterlibatan aparat desa dan aparat pemerintah setempat, meskipun terdapat kendala terkait data penerima bantuan yang belum akurat, yang kemudian diperbaiki melalui mekanisme administrasi bersama aparat desa dan aparat keamanan. Hasil ini relevan dalam konteks distribusi bantuan sosial yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan data yang valid agar sasaran tepat guna. Penelitian Ramadan dan Thomas (2011) yang menggunakan pendekatan Mixed Demand untuk menganalisis reformasi program subsidi pangan di Mesir mengungkapkan bahwa program subsidi pangan memiliki peranan penting dalam melindungi kesejahteraan konsumen dari fluktuasi harga pangan. Studi ini menunjukkan bahwa subsidi pangan membantu menjaga stabilitas konsumsi makanan keluarga, khususnya di kelompok pendapatan rendah, meskipun reformasi program subsidi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya program bantuan pangan yang terstruktur untuk mengatasi kerentanan ekonomi akibat ketidakpastian harga pangan. Sementara itu, Mabli dan Ohls (2015) melalui evaluasi Program Supplemental Nutrition Assistance (SNAP) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa partisipasi dalam program bantuan pangan tersebut secara signifikan menurunkan tingkat ketidakamanan pangan di tingkat rumah tangga hingga 17%. Penelitian ini menegaskan dampak positif program bantuan pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga penerima, sehingga menunjukkan efektivitas bantuan pangan dalam mengurangi masalah pangan dan gizi pada rumah tangga miskin. Dalam ranah bantuan bersyarat (conditional cash transfers/CCT), beberapa studi juga menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga penerima. Misalnya, Lim et al. (2010) mengevaluasi program Janani Suraksha Yojana di India yang memberikan bantuan tunai dengan syarat kunjungan kesehatan ibu dan persalinan di fasilitas kesehatan. Program ini berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian neonatal dan perinatal secara signifikan, sekaligus mengilustrasikan bagaimana bantuan tunai yang disertai syarat dapat meningkatkan hasil kesehatan masyarakat. Pendekatan serupa ditemukan dalam kajian sistematis oleh Lagarde et al. (2007), yang menilai efektivitas program cash transfer bersyarat dalam meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan preventif di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kajian ini menunjukkan bahwa CCT mampu meningkatkan akses dan penggunaan layanan

kesehatan, meskipun dampaknya terhadap status kesehatan jangka panjang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Fernald et al. (2008) mendukung temuan tersebut dengan meneliti dampak program Oportunidades di Meksiko, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah bantuan tunai bersyarat berkorelasi dengan perbaikan indikator status gizi dan perkembangan kognitif anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan sumber daya manusia jangka panjang. Selain itu, Rasella et al. (2013) melaporkan bahwa cakupan program Bolsa Familia di Brasil yang bersifat conditional cash transfer berkontribusi pada penurunan angka kematian anak-anak di bawah usia lima tahun, terutama dari penyebab yang berkaitan dengan kemiskinan seperti malnutrisi dan diare. Penelitian ini menegaskan peranan bantuan sosial bersyarat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat miskin secara sistemik. Lagarde et al. (2009) dalam tinjauan sistematis lainnya menambahkan bukti bahwa program CCT secara konsisten meningkatkan penggunaan layanan kesehatan dan status nutrisi anak-anak dan ibu hamil, meskipun sulit untuk memisahkan dampak langsung insentif tunai dari faktor-faktor lain dalam program tersebut. Namun, secara umum, program bantuan tunai bersyarat memberikan kontribusi positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Pengalaman di kawasan Amerika Latin juga menjadi pelajaran penting, seperti yang diulas oleh Handa dan Davis (2006), yang mengemukakan bahwa meskipun program CCT berhasil mencapai tujuan utama dalam peningkatan akumulasi modal manusia, seperti pendidikan dan kesehatan anak, terdapat keraguan mengenai efisiensi biaya dan keberlanjutan jangka panjang program tersebut. Mereka juga menyoroti bahwa fokus yang sangat kuat pada akumulasi modal manusia anak-anak kadang mengabaikan dampak lebih luas pada kesejahteraan keluarga dan konteks pembangunan pedesaan yang lebih holistik. Terakhir, Baird et al. (2014) dalam tinjauan sistematis mengenai efek program cash transfer terhadap hasil pendidikan menemukan bahwa baik program bersyarat maupun tidak bersyarat sama-sama meningkatkan kemungkinan anak-anak terdaftar dan bersekolah. Namun, program dengan pengawasan ketat terhadap pemenuhan syarat menunjukkan efek yang lebih besar. Walaupun dampak pada hasil belajar seperti nilai ujian masih terbatas, bukti menunjukkan bahwa program cash transfer memiliki potensi memperbaiki akses pendidikan dalam jangka pendek.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berbagai penelitian terdahulu secara luas telah mengeksplorasi efektivitas program bantuan sosial berupa transfer tunai baik bersyarat maupun tidak bersyarat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di berbagai negara dan konteks sosial-ekonomi. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Agustina & Hendra (2021) menyoroti aspek implementasi bantuan langsung tunai dalam situasi darurat sosial seperti pandemi COVID-19, menunjukkan pentingnya koordinasi antar aparat desa dan pemangku kepentingan dalam memastikan distribusi yang tepat sasaran. Sementara itu, penelitian-penelitian internasional seperti oleh Ramadan & Thomas (2011) dan Mabli & Ohls (2015) menegaskan dampak positif bantuan pangan subsidi terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga, meskipun dengan berbagai tantangan seperti volatilitas harga dan distribusi yang tidak merata. Lebih jauh, sejumlah kajian dari berbagai negara berkembang, seperti program conditional cash transfers (CCT) di India, Meksiko, Brasil,

dan negara-negara Amerika Latin (Lim et al., 2010; Lagarde et al., 2007, 2009; Fernald et al., 2008; Rasella et al., 2013; Handa & Davis, 2006; Baird et al., 2014), menekankan keberhasilan program-program tersebut dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, menurunkan angka kematian anak, serta mendorong peningkatan status gizi dan pendidikan anak-anak. Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada indikator makro dan dampak langsung program, dengan keterbatasan dalam mengungkap dinamika sosial-ekonomi dan tantangan implementasi di tingkat lokal atau komunitas. Dalam konteks Indonesia, dan khususnya wilayah Indonesia Timur yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan geografis yang unik, terdapat kekosongan studi yang mendalam mengenai pelaksanaan dan dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara holistik, terutama di tingkat kelurahan dengan tingkat kemiskinan yang fluktuatif seperti Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan atau evaluasi kuantitatif makro, penelitian ini mengangkat pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan analisis sosial-ekonomi, efektivitas distribusi, serta dampak jangka panjang terhadap kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi kebaruan ilmiah melalui pendalaman konteks lokal yang jarang disentuh, serta pemahaman lebih luas tentang bagaimana program BPNT beroperasi dan berimplikasi pada dinamika kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan kawasan timur Indonesia. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris terkait efektivitas program, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan bantuan sosial yang lebih responsif dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.5. Tujuan

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Waneakota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Teori Kesejahteraan Sosial menurut Midgley dalam Purwibowo. K. W (2023) sebagai kerangka konseptual utama. Teori ini dipilih karena memberikan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam memahami upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai dimensi, yaitu filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial, dan pembangunan sosial. Pendekatan multidimensi ini sangat relevan untuk menilai bagaimana program bantuan sosial, khususnya BPNT, berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik digunakan untuk menggali secara mendalam proses pelaksanaan dan dampak BPNT terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Ranotana Weru. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang dirasakan langsung oleh berbagai pihak terkait, mulai dari pengambil kebijakan hingga penerima manfaat. Dengan demikian,

penelitian dapat menangkap realitas sosial yang kompleks dan dinamis yang tidak dapat diperoleh hanya melalui data kuantitatif (Nurdin & Hartati, 2019).. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn juga diaplikasikan untuk mengarahkan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan BPNT. Model ini sangat cocok untuk menilai bagaimana standar kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial-ekonomi mempengaruhi efektivitas program di lapangan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta data sekunder dari dokumen resmi, peraturan, dan literatur terkait. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas dan keakuratan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (Simangunsong, 2017). Sebanyak 28 informan dilibatkan dalam penelitian ini, terdiri atas Kepala Dinas Sosial Kota Manado, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Camat Wanea, Lurah Ranotana Weru, Koordinator BPNT Kota Manado, tiga agen kios penyalur BPNT, dan 20 masyarakat penerima manfaat BPNT. Kepala Dinas Sosial dipilih sebagai informan kunci karena perannya yang sangat strategis dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program BPNT di tingkat kota. Sebagai pengambil kebijakan utama, informan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tujuan, kendala, dan hasil pelaksanaan program. Informan lain dipilih untuk memberikan perspektif yang beragam mulai dari pelaksana lapangan hingga penerima manfaat, sehingga penelitian ini mampu menilai dampak program BPNT secara menyeluruh, dari aspek kebijakan, implementasi, hingga kesejahteraan sosial masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan menggunakan kerangka teori dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana program BPNT berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Ranotana Weru serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Program BPNT Di Kelurahan Ranota Weru

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Sosial yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Program ini bertujuan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dengan memberikan bantuan pangan secara non tunai kepada keluarga miskin. Pelaksanaan BPNT melibatkan kerja sama dengan bank-bank milik negara seperti Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efisien. Di Kelurahan Ranotana Weru, Kota Manado, BPNT memberikan dampak positif yang signifikan baik dari sisi sosial maupun ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat. Secara sosial, program ini berkontribusi meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan mengurangi ketegangan sosial yang mungkin muncul akibat ketimpangan akses pangan. Dari sisi ekonomi, BPNT membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga karena keluarga penerima dapat membeli

bahan pangan dengan kualitas lebih baik dan bergizi, seperti beras, minyak goreng, telur, susu, dan gula, melalui toko atau pasar yang telah ditunjuk (e-warong). Hal ini sangat berarti karena sebelumnya banyak keluarga miskin kesulitan mengakses bahan pangan sehat akibat keterbatasan ekonomi. Program ini mensyaratkan penerima manfaat memenuhi kriteria keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian, bantuan ini diharapkan dapat lebih fokus menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk mengoptimalkan dampak program, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan BPNT menjadi hal penting. Pengawasan yang baik serta keterlibatan masyarakat dalam proses distribusi akan memastikan bantuan tersalurkan secara tepat dan dapat dimanfaatkan maksimal. Dalam menganalisis dampak sosial BPNT, penelitian menggunakan teori kesejahteraan sosial menurut Midgley yang membagi kesejahteraan menjadi empat pendekatan utama: filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial, dan pembangunan sosial. Keempat pendekatan ini memberikan kerangka komprehensif untuk melihat bagaimana BPNT tidak hanya sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Filantropi sosial tercermin dalam pencapaian sasaran bantuan bagi keluarga miskin. Pekerjaan sosial terlihat dari edukasi dan pendampingan kepada masyarakat penerima agar penggunaan bantuan tepat guna. Administrasi sosial hadir dalam efisiensi distribusi dan penanganan keluhan terkait pelaksanaan program. Sementara pembangunan sosial diwujudkan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program. Dengan pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPNT di Kelurahan Ranotana Weru memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, yang tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari penguatan hubungan sosial dan tata kelola distribusi bantuan yang lebih baik.

1. Filantropi Sosial

Filantropi terkait erat dengan upaya kesejahteraan sosial yang bertujuan mempromosikan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penyediaan barang pribadi dan pelayanan kepada orang yang membutuhkan, baik melalui penyediaan waktu, uang, maupun tenaga. Pemerintah berperan penting dalam mencapai peningkatan ekonomi jangka panjang melalui program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

a. Pencapaian Sasaran

Pemerintah Kota Manado, khususnya di Kelurahan Ranotana Weru, menjalankan Program BPNT sebagai bentuk implementasi filantropi sosial. Program ini fokus pada memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan didistribusikan secara merata. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk memverifikasi data penerima bantuan dan melakukan monitoring secara berkelanjutan di lapangan. Upaya validasi data menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara tepat dan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat warga yang belum terdata sebagai penerima bantuan BPNT meskipun

kondisinya membutuhkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan ketelitian dan akurasi dalam proses pendataan sehingga distribusi bantuan dapat berjalan lebih merata. Selain itu, proses administrasi pendataan yang terkadang berjalan lambat berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam mengakses bantuan. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan keresahan, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, perbaikan mekanisme pendataan dan percepatan proses validasi sangat diperlukan agar program bantuan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang berhak.

b. Kepemimpinan Sosial

Dalam pelaksanaan program BPNT, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang harus memberikan teladan dan tanggung jawab sosial. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan pihak kelurahan, telah menunjukkan kepemimpinan sosial yang baik dengan menjunjung tinggi sikap menghormati dan melayani masyarakat sebagai sesama manusia. Kepemimpinan sosial ini juga diwujudkan melalui keaktifan pemimpin lokal, seperti lurah, dalam mendampingi dan membantu masyarakat yang tidak mampu mengambil bantuan secara mandiri, termasuk warga lanjut usia. Dengan cara ini, pemimpin tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga terlibat langsung dalam memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan merata. Kehadiran pemimpin secara langsung di lapangan dalam proses penyaluran bantuan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi contoh positif dalam pelaksanaan program sosial lainnya. Sikap dan komitmen moral pemimpin dalam melayani masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program dan terciptanya rasa aman dan nyaman bagi penerima bantuan. Meskipun kepemimpinan sosial telah berjalan dengan baik dan sebagian besar masyarakat telah menerima bantuan, pemerataan distribusi bantuan BPNT belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih diperlukan upaya maksimal dari pemerintah untuk meninjau kembali data penerima dan memperbaiki sistem pendataan agar seluruh warga miskin yang berhak dapat menerima bantuan secara adil dan merata.

2. Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan pendekatan yang terorganisir dengan melibatkan tenaga profesional yang kompeten untuk menangani berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan. Salah satu bentuk nyata dari upaya pekerjaan sosial pemerintah adalah melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang bertujuan memberikan bantuan guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Edukasi

Dalam pelaksanaan BPNT, pengelolaan dana yang memadai menjadi faktor krusial agar program dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah Kota Manado secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program BPNT, namun sosialisasi ini masih dianggap belum maksimal. Banyak masyarakat yang telah menerima bantuan, namun masih ada segmen yang belum memperoleh akses bantuan tersebut. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap program ini masih terbatas pada aspek penerimaan bantuan semata, tanpa benar-benar memahami tujuan dan manfaat jangka panjang dari program BPNT. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi kepada masyarakat mengenai program belum sepenuhnya efektif. Hal ini berpotensi membuat penerima bantuan hanya bersifat konsumtif, tanpa adanya perubahan sikap atau peningkatan kemandirian yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut. Walaupun bantuan yang diberikan dirasakan cukup membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, pemahaman akan fungsi dan tujuan program perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Pendampingan

Pendampingan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan BPNT untuk memastikan distribusi bantuan berjalan dengan baik dan setiap kendala yang dihadapi masyarakat dapat segera teratasi. Pemerintah, melalui aparat kelurahan dan dinas terkait, memiliki kewenangan untuk mendampingi pelaksanaan program ini. Namun, keterbatasan jumlah tenaga pendamping menjadi kendala utama dalam menjamin pendampingan yang optimal. Pendampingan yang ada selama ini masih terbatas pada saat distribusi bantuan dan belum merata dalam proses pendampingan secara menyeluruh. Hal ini membuat beberapa permasalahan masyarakat tidak terselesaikan secara cepat dan efektif. Selain itu, peran agen kios penyalur dalam menerima dan meneruskan keluhan masyarakat menjadi sangat penting. Meskipun ada komunikasi langsung antara masyarakat dengan agen penyalur, tingkat pendampingan dari pemerintah masih kurang memadai, sehingga masih terdapat keluhan terkait keterlambatan dan hambatan lain dalam penyaluran bantuan. Dari sisi masyarakat penerima, meskipun mereka merasakan adanya pendampingan dari pemerintah, hal tersebut masih dianggap jarang dan belum konsisten. Mereka cenderung menyampaikan masalah secara langsung kepada agen penyalur, yang kemudian meneruskannya ke pemerintah, sehingga proses penyelesaian masalah menjadi tidak langsung dan terkadang lambat.

3. Administrasi Sosial

Pendekatan administrasi sosial berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan program-program sosial pemerintah yang efektif dan tepat sasaran. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu kebijakan sosial yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan menyediakan bantuan pangan secara langsung kepada penerima manfaat. Evaluasi terhadap pelaksanaan program BPNT sangat penting untuk menilai sejauh mana program ini berjalan efisien dan mampu memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan sosial.

a. Efisiensi Distribusi

Dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan BPNT, sistem yang diterapkan telah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Pemerintah kota Manado telah membangun mekanisme pelaporan yang terorganisir dan responsif terhadap berbagai keluhan yang muncul dari masyarakat. Sistem ini memungkinkan keluhan yang disampaikan oleh penerima manfaat dapat segera ditindaklanjuti, sehingga distribusi bantuan dapat berlangsung secara lancar dan tidak menghambat proses penerimaan bantuan oleh masyarakat. Koordinasi yang baik antar berbagai unsur pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga dinas sosial, juga menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan berjalan tertib. Mekanisme ini mempermudah masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima untuk mengambil bantuan langsung di agen penyalur yang sudah ditentukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan efisien. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, terutama terkait ketepatan waktu penyaluran bantuan. Data penerima bantuan yang belum selalu terupdate menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan keterlambatan dalam distribusi. Ketidakakuratan data ini juga menyebabkan adanya penerima yang tidak layak namun masih tercantum dalam daftar, dan sebaliknya ada masyarakat yang berhak namun tidak tercatat. Kondisi ini memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam hal validasi dan pembaruan data agar distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

b. Penanganan Keluhan

Penanganan keluhan merupakan aspek penting dalam upaya memastikan kelancaran dan keefektifan program BPNT. Meskipun secara umum bantuan tetap diterima masyarakat, keterlambatan dalam penyaluran bantuan masih menjadi keluhan yang signifikan. Pemerintah daerah telah membangun mekanisme pelaporan keluhan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk agen penyalur, kelurahan, dan dinas sosial. Keluhan masyarakat yang diterima selalu ditampung dan ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif antar instansi terkait. Namun, pelaksanaan penanganan keluhan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kecepatan respons dan penyelesaian masalah teknis seperti keterlambatan dana dan data yang tidak akurat. Ketidakakuratan data penerima yang belum diperbarui secara tepat waktu menjadi kendala utama yang menimbulkan keluhan dari masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan waktu dalam pendistribusian BPNT, sehingga beberapa penerima harus menunggu lebih lama dari jadwal yang ditentukan. Pemerintah daerah menyadari pentingnya upaya peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pelaksana program dan penerima manfaat guna mengurangi masalah keterlambatan ini dan mempercepat penanganan keluhan yang muncul.

4. Pembangunan Sosial

a. Koordinasi Instansi

Pembangunan sosial merupakan proses perubahan sosial yang dirancang secara terencana dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

merupakan salah satu upaya pembangunan sosial yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pelaksanaan program BPNT memerlukan koordinasi yang erat antar berbagai instansi pemerintah, mulai dari Dinas Sosial, tingkat kecamatan, kelurahan, hingga agen penyalur yang berperan langsung dalam distribusi bantuan. Koordinasi antar instansi di Kota Manado telah berlangsung secara intensif dengan melibatkan Dinas Sosial sebagai lembaga pengarah, kecamatan dan kelurahan sebagai pelaksana teknis di lapangan, serta agen penyalur sebagai ujung tombak distribusi bantuan. Sinergi ini memastikan proses distribusi bantuan pangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Namun demikian, meskipun koordinasi teknis antar lembaga telah terjalin dengan baik, peran serta masyarakat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan program masih tergolong terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang terjadi lebih banyak bersifat administratif dan operasional tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi program. Di tingkat kelurahan, meskipun memiliki kewenangan dalam verifikasi data penerima dan pendampingan pelaksanaan program, terdapat keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis yang harus diselesaikan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial. Model koordinasi seperti ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, tetapi juga menandakan adanya batasan yang dapat menghambat respons cepat terhadap masalah di lapangan apabila mekanisme koordinasi tidak berjalan efektif.

b. Keterlibatan Masyarakat

Terkait keterlibatan masyarakat, program BPNT di Kota Manado telah menerima partisipasi dalam bentuk usulan dan pelaporan dari masyarakat terkait data penerima bantuan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat tidak semata-mata menjadi objek program, melainkan juga mulai berperan sebagai subjek yang mengawasi dan mendukung pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dalam pelaporan kendala distribusi menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang dapat menjadi modal sosial dalam pengelolaan program bantuan. Namun, keterlibatan masyarakat dalam program ini masih bersifat pasif dan terbatas pada pelaporan teknis semata. Belum terdapat program lanjutan yang secara langsung membina masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian ekonomi, sehingga ketergantungan terhadap bantuan cenderung berlanjut. Sebagian masyarakat mengharapkan adanya pelatihan atau pendampingan usaha kecil yang dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sebagian pihak pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan mengakui bahwa edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan program BPNT masih belum merata. Pemahaman yang terbatas ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan jangka panjang dari program, yaitu membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam aspek edukasi dan pemberdayaan agar bantuan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan secara sementara, tetapi juga mampu menjadi titik awal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3.2. Dampak Kesejahteraan Sosial Program BPNT di Kelurahan Ranota Weru

a. Dampak Sosial Program BPNT di Kelurahan Ranotana Weru

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan dampak sosial yang cukup signifikan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Ranotana Weru sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu dampak sosial utama adalah peningkatan ketersediaan pangan di rumah tangga penerima bantuan. Program ini memastikan bahwa kebutuhan dasar berupa bahan pokok seperti beras dan telur dapat terpenuhi dengan lebih mudah, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman dari lingkungan sekitar dapat berkurang secara signifikan. Ketersediaan bahan pangan yang lebih stabil di rumah tangga ini tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan rasa aman dan mengurangi beban psikologis masyarakat miskin. Selain aspek ketersediaan pangan, BPNT juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui pelaksanaan program ini, masyarakat merasa lebih diperhatikan dan dihargai oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Interaksi yang terjalin antara petugas pelaksana program dan penerima manfaat selama distribusi bantuan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka dan intensif. Kondisi ini mendorong terciptanya rasa saling percaya dan mempererat hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal. Lebih lanjut, walaupun sosialisasi terkait program BPNT tidak selalu rutin dilakukan, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Kelurahan turut memperkuat pola komunikasi dua arah yang lebih efektif. Dengan demikian, BPNT tidak hanya menjawab kebutuhan pangan tetapi juga memperbaiki dinamika sosial di masyarakat, terutama dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

b. Dampak Ekonomi Program BPNT di Kelurahan Ranotana Weru

Dari sisi ekonomi, program BPNT memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh keluarga miskin di Kelurahan Ranotana Weru, khususnya dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan membantu efisiensi pengelolaan anggaran keluarga. Bantuan pangan berupa bahan pokok yang diberikan memungkinkan penerima manfaat untuk mengalokasikan pengeluaran yang sebelumnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok ke kebutuhan rumah tangga lainnya yang juga penting, seperti pendidikan anak-anak atau kebutuhan kesehatan keluarga. Dengan demikian, program ini memberikan ruang bagi keluarga miskin untuk mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih baik dan memberikan rasa aman dalam menghadapi kebutuhan dasar sehari-hari. Namun, meskipun memberikan manfaat ekonomi secara langsung, dampak program BPNT pada sisi kemandirian ekonomi masyarakat masih terbatas. Bantuan ini cenderung bersifat jangka pendek dan konsumtif, karena belum mengandung unsur pemberdayaan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan atau pengembangan usaha kecil bagi penerima manfaat. Kondisi ini menyebabkan adanya kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan, di mana sebagian masyarakat merasa khawatir dan tidak siap bila program bantuan tersebut dihentikan. Ketergantungan ini juga menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan

kesejahteraan keluarga apabila bantuan tidak dilanjutkan atau dihentikan, yang secara tidak langsung menghambat upaya pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merancang program lanjutan yang tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi. Program lanjutan tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, atau dukungan modal usaha yang dapat membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Dengan adanya pendekatan pemberdayaan seperti ini, dampak program BPNT diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

3.3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Ranota Weru

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Ranotana Weru menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan, seperti keterlambatan penyaluran bantuan, minimnya sosialisasi kepada penerima manfaat, ketidaktepatan data penerima, lemahnya koordinasi antar pelaksana, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pendamping. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai upaya strategis telah dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Pertama, penguatan koordinasi dan komunikasi antar lini pelaksana menjadi langkah utama yang ditempuh. Pemerintah kelurahan memperkuat sinergi dengan Dinas Sosial Kota Manado, kecamatan, serta agen e-warong sebagai penyalur bantuan. Dengan membangun komunikasi yang intensif dan berkesinambungan, proses penanganan masalah di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan responsif. Koordinasi yang baik ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian gangguan teknis dengan segera, tetapi juga meminimalisasi risiko keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Pelibatan semua pemangku kepentingan melalui komunikasi dua arah memastikan bahwa setiap hambatan dapat segera dideteksi dan ditindaklanjuti secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan koordinasi merupakan kunci utama untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program di tingkat lapangan. Kedua, pembaruan dan validasi data penerima bantuan dilakukan secara berkala dan sistematis melalui kerja sama antara pemerintah kelurahan dan Dinas Sosial Kota Manado. Proses verifikasi ulang ini sangat penting agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran, yaitu benar-benar diterima oleh masyarakat miskin yang berhak. Pendataan ulang melibatkan identifikasi keluarga penerima yang mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun perpindahan domisili sehingga data yang digunakan selalu mutakhir. Selain dari sisi pemerintah, keterlibatan masyarakat juga sangat berarti dalam proses ini. Usulan dari masyarakat terkait warga yang layak menerima bantuan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan akurasi data. Kolaborasi aktif antara masyarakat dan pemerintah dalam pendataan ulang memperkuat mekanisme kontrol sosial sekaligus meningkatkan keadilan dan transparansi distribusi bantuan. Ketiga, peningkatan sosialisasi dan edukasi program menjadi fokus lain untuk mengatasi minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme dan tujuan pelaksanaan BPNT. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, penyebaran informasi lewat media digital, serta keterlibatan langsung pihak kelurahan dan Dinas Sosial dalam memberikan edukasi. Walaupun sosialisasi sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebelum penyaluran, kelurahan tetap berperan aktif memberikan penjelasan tambahan secara

langsung untuk memastikan masyarakat benar-benar memahami program ini. Edukasi yang berkelanjutan menjadi sangat penting agar masyarakat tidak hanya sekadar menerima bantuan secara pasif, tetapi juga mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai penerima. Di samping itu, agen penyalur e-warong juga turut berperan menjembatani informasi dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya saat proses penyaluran bantuan berlangsung. Peran agen penyalur tidak hanya sebagai saluran teknis, tetapi juga sebagai sumber informasi yang membantu mengatasi kebingungan masyarakat mengenai program. Secara keseluruhan, sosialisasi dan edukasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat akan memberikan dampak jangka panjang terhadap perubahan pola pikir masyarakat penerima. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memanfaatkan program serta bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pendekatan ini mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sehingga tujuan utama BPNT, yaitu membantu masyarakat miskin secara tepat sasaran dan efektif, dapat tercapai dengan baik. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan hambatan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Ranotana Weru bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan koordinasi lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat. Penguatan koordinasi, pembaruan data, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi merupakan pilar penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial yang menjadi harapan bersama dalam mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Ranotana Weru, Kota Manado memiliki dampak positif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan bagi keluarga penerima manfaat. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya berbagai kendala dalam implementasi program, seperti kualitas dan kuantitas bantuan yang tidak konsisten, keterlambatan distribusi, rendahnya literasi digital sebagian penerima, serta lemahnya koordinasi antara pelaksana program di tingkat lokal. Jika dibandingkan dengan sepuluh penelitian terdahulu, sebagian besar fokus pada dampak program bantuan pangan terhadap ketahanan pangan (Mabli & Ohls, 2015; Ramadan & Thomas, 2011; Kusnadi, 2018), efektivitas kebijakan (Agustina & Hendra, 2021; Nurhayati, 2020), serta implementasi teknis program (Siregar & Bakhtiar, 2022). Penelitian-penelitian tersebut secara umum mendukung bahwa BPNT dan program sejenis berkontribusi terhadap perbaikan gizi, pengurangan kerawanan pangan, dan peningkatan konsumsi pangan rumah tangga. Dalam hal ini, temuan penelitian Anda sejalan dengan hasil studi tersebut, khususnya dalam aspek peningkatan akses pangan secara langsung melalui sistem bantuan non tunai. Namun, penelitian ini menghadirkan dimensi baru yang belum banyak disentuh oleh studi-studi sebelumnya. Misalnya, penelitian Nurhayati (2020) lebih menekankan pada efektivitas program di tingkat kebijakan nasional tanpa mengeksplorasi pengalaman langsung penerima di tingkat lokal. Begitu pula dengan studi Kusnadi (2018) dan Mabli & Ohls (2015), yang cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dan tidak mendalami aspek persepsi masyarakat terhadap kualitas bantuan dan pelaksanaannya. Penelitian Anda memperluas cakupan kajian dengan mengangkat dimensi persepsi, kepuasan, serta hambatan operasional, yang dalam sepuluh penelitian sebelumnya kurang diuraikan secara mendalam, terutama

dalam konteks geografis Indonesia Timur. Lebih lanjut, penelitian ini juga menambahkan perspektif baru tentang tantangan koordinasi antar instansi, sebagaimana disentuh secara terbatas oleh Siregar dan Bakhtiar (2022), namun dalam konteks yang berbeda. Penelitian Anda menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi antara Dinas Sosial, bank penyalur, dan e-warong berdampak langsung terhadap keterlambatan distribusi dan ketidaksesuaian data penerima manfaat. Hal ini menjadi kontribusi penting karena menambahkan dimensi governance dan kelembagaan ke dalam diskursus implementasi BPNT, yang hanya disinggung sekilas dalam jurnal lain. Selain itu, penelitian ini berbeda dari jurnal-jurnal seperti Putri (2020) atau Suwartiningsih & Rahayu (2021) yang lebih fokus pada urban area di wilayah Jawa, karena konteks penelitian Anda berada di Indonesia bagian timur dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda, seperti tantangan geografis, ketimpangan akses digital, dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Ini memperkaya literatur nasional yang masih dominan dengan kajian-kajian dari wilayah barat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi temuan sebelumnya dalam hal dampak positif BPNT terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi kebaruan dalam aspek persepsi penerima, kualitas koordinasi lintas lembaga, serta konteks lokal masyarakat urban di Indonesia Timur. Penelitian ini memperluas pemahaman akademik dan praktis tentang dinamika pelaksanaan program bantuan sosial, serta dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu topik menarik yang muncul dari beberapa jurnal terdahulu adalah pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bantuan sosial. Misalnya, jurnal dari Siregar & Bakhtiar (2022) menyoroti pentingnya penerapan sistem elektronik seperti *e-money* dan *e-warong* untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Hal ini senada dengan temuan Mabli & Ohls (2015) yang menilai bahwa sistem digital dapat mengurangi kesalahan penyaluran, mempercepat waktu distribusi, dan mengurangi kebocoran bantuan. Namun demikian, kondisi di lapangan, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur digital terbatas, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital dan terbatasnya akses jaringan internet. Oleh karena itu, topik ini membuka ruang kajian lanjut tentang bagaimana inovasi teknologi dapat diadaptasi dalam konteks wilayah dengan keterbatasan tersebut. Topik menarik lainnya adalah ketersediaan dan aksesibilitas komoditas pangan lokal dalam pelaksanaan program bantuan. Dalam jurnal Kusnadi (2018) dan Nurhayati (2020), ditekankan bahwa integrasi produk lokal ke dalam skema bantuan tidak hanya menjamin ketersediaan pangan yang segar dan sesuai dengan selera masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi lokal. Namun, implementasi kebijakan ini masih terkendala oleh dominasi pemasok besar dan lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal. Isu ini menjadi penting karena mencerminkan potensi sinergi antara program bantuan sosial dan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Selain itu, jurnal Milagros et al. (2020) dan Effendy (2020) menyinggung tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program bantuan sosial. Mereka menunjukkan bahwa pelibatan aktif masyarakat dalam proses

pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik penyelewengan. Namun, di banyak konteks, partisipasi ini masih bersifat pasif karena kurangnya akses informasi, kapasitas organisasi, maupun ruang dialog antara pemerintah dan penerima manfaat. Ini menjadi topik penting dalam perumusan desain kebijakan berbasis masyarakat (community-based policy). Tidak kalah menarik, beberapa jurnal seperti Okello et al. (2020) dan Rachmawati (2021) membahas ketahanan pangan dari perspektif ketergantungan pada bantuan, yang menimbulkan kekhawatiran akan jangka panjang. Ketika masyarakat terlalu bergantung pada bantuan pemerintah, maka potensi produktivitas lokal bisa menurun, terutama jika tidak diiringi dengan strategi pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi antara bantuan dan program pengembangan kapasitas menjadi sangat penting agar ketahanan pangan bersifat berkelanjutan. Akhirnya, jurnal dari Fitriani (2021) dan Widiyanto (2019) memunculkan diskusi menarik tentang kesesuaian kebijakan pusat dengan kondisi lokal. Sering kali program seperti BPNT dirancang secara nasional tanpa mempertimbangkan variasi konteks sosial-ekonomi dan geografis daerah. Ketidaksesuaian ini menyebabkan rendahnya efektivitas program dan ketidaktepatan sasaran. Topik ini penting untuk dieksplorasi dalam upaya mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal (*bottom-up approach*).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Ranotana Weru masih menghadapi tantangan signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui penguatan koordinasi antar pelaksana, pembaruan data yang akurat dan berkelanjutan, serta peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima bantuan. Kesuksesan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh sinergi antar pelaku yang terlibat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses, mulai dari verifikasi data hingga evaluasi pelaksanaan. Pendekatan kolaboratif yang mengedepankan komunikasi efektif dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap program. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas agen penyalur dan penguatan mekanisme komunikasi dua arah menjadi aspek strategis yang harus terus diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program BPNT.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Pertama, fokus penelitian yang terbatas hanya pada Kelurahan Ranotana Weru menjadikan hasil temuan kurang mewakili kondisi di wilayah lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan administrasi yang berbeda. Hal ini membatasi kemampuan generalisasi temuan penelitian untuk konteks yang lebih luas. Kedua, metode

pengumpulan data yang mengandalkan wawancara dan observasi langsung rawan terhadap bias persepsi dari para informan. Ketidakterbukaan atau keberpihakan informan terhadap program dapat memengaruhi validitas data yang diperoleh. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian membatasi pendalaman analisis, terutama terkait dampak jangka panjang program BPNT terhadap kesejahteraan sosial ekonomi penerima. Terakhir, penelitian ini kurang mengeksplorasi aspek teknologi dan inovasi digital dalam pengelolaan program yang berpotensi memperbaiki efisiensi dan transparansi penyaluran bantuan. Padahal, teknologi informasi bisa menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pelaksana serta mempermudah monitoring program.

Arah Penelitian Masa Depan (*Future Work*). Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Program BPNT di berbagai daerah dengan latar sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Pendekatan komparatif antar daerah juga dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan khas yang mungkin tidak tampak dalam studi kasus tunggal. Selain itu, penelitian masa depan hendaknya mengadopsi desain longitudinal guna mengkaji dampak jangka panjang program terhadap aspek kesejahteraan penerima bantuan, seperti perbaikan gizi, stabilitas ekonomi rumah tangga, dan kemandirian sosial. Kajian ini akan memberikan informasi lebih mendalam tentang efektivitas program dalam jangka waktu yang lebih luas. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran agen penyalur sebagai fasilitator komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan kapasitas mereka melalui pelatihan dan teknologi informasi. Kajian tentang inovasi digital dalam pelaksanaan program juga sangat relevan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi bantuan sosial. Terakhir, penelitian masa depan dapat mengembangkan model koordinasi dan komunikasi yang inovatif dan adaptif, termasuk pemanfaatan platform digital dan aplikasi mobile, yang memungkinkan feedback cepat dan monitoring real-time dari proses distribusi bantuan. Pendekatan teknologi ini dapat meningkatkan responsivitas dan mengurangi potensi kebocoran atau kesalahan distribusi dalam program bantuan sosial.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Manado yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, I., & Hendra, A. (2021). Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(2), 132–144. <https://doi.org/10.33701/jekp.v8i2.2792>

- Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2025). Perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara 2024. <https://sulut.bps.go.id/id/publication/2025/04/25/30771230db27f58b45531639/perke-mbangan-tingkat-kemiskinan-provinsi-sulawesi-utara-2024.html>
- Baird, S., Ferreira, F. H. G., Özler, B., & Woolcock, M. (2014). Conditional, unconditional and everything in between: A systematic review of the effects of cash transfer programmes on schooling outcomes. *Journal of Development Effectiveness*, 6(1), 1–43. <https://doi.org/10.1080/19439342.2014.890362>
- Banerjee, A., Hanna, R., Kyle, J., Olken, B. A., & Sumarto, S. (2018). Tangible information and citizen empowerment: Identification cards and food subsidy programs in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 126(2), 451–491. <https://doi.org/10.1086/696226>
- Black, A. P., Brimblecombe, J., Eyles, H., Morris, P., Vally, H., & O’Dea, K. (2012). Food subsidy programs and the health and nutritional status of disadvantaged families in high income countries: A systematic review. *BMC Public Health*, 12(1), 1099. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-1099>
- Doocy, S., Tappis, H., Lyles, E., Witiw, J., & Aken, V. (2017). Emergency food assistance in Northern Syria: An evaluation of transfer programs in Idleb Governorate. *Food and Nutrition Bulletin*, 38(2), 240–259. <https://doi.org/10.1177/0379572117700755>
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. (2024). *Data jumlah penduduk miskin per kelurahan di Kecamatan Wanea tahun 2020–2024*. Kota Manado: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
- Fernald, L. C., Gertler, P. J., & Neufeld, L. M. (2008). Role of cash in conditional cash transfer programmes for child health, growth, and development: An analysis of Mexico’s Oportunidades. *The Lancet*, 371(9615), 828–837. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60382-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60382-7)
- Galloway, T. (2014). Is the Nutrition North Canada retail subsidy program meeting the goal of making nutritious and perishable food more accessible and affordable in the North? *Canadian Journal of Public Health*, 105(5), e395–e397. <https://doi.org/10.17269/cjph.105.4624>
- Galloway, T. (2017). Canada’s northern food subsidy Nutrition North Canada: A comprehensive program evaluation. *International Journal of Circumpolar Health*, 76(1), 1279451. <https://doi.org/10.1080/22423982.2017.1279451>
- Handa, S., & Davis, B. (2006). The experience of conditional cash transfers in Latin America and the Caribbean. *Development Policy Review*, 24(5), 513–536. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2006.00345.x>
- Harnack, L., Oakes, J. M., Elbel, B., Beatty, T., Rydell, S., & French, S. (2016). Effects of subsidies and prohibitions on nutrition in a food benefit program. *JAMA Internal Medicine*, 176(11), 1610. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.5633>
- Lagarde, M., Haines, A., & Palmer, N. (2007). Conditional cash transfers for improving uptake of health interventions in low- and middle-income countries. *JAMA*, 298(16), 1900. <https://doi.org/10.1001/jama.298.16.1900>

- Lagarde, M., Haines, A., & Palmer, N. (2009). The impact of conditional cash transfers on health outcomes and use of health services in low and middle income countries. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008137>
- Lim, S. S., Dandona, L., Hoisington, J. A., James, S. L., Hogan, M. C., & Gakidou, E. (2010). India's Janani Suraksha Yojana, a conditional cash transfer programme to increase births in health facilities: An impact evaluation. *The Lancet*, 375(9730), 2009–2023. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60744-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60744-1)
- Mabli, J., & Ohls, J. (2015). Supplemental Nutrition Assistance Program participation is associated with an increase in household food security in a national evaluation. *The Journal of Nutrition*, 145(2), 344–351. <https://doi.org/10.3945/jn.114.198697>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Purwibowo, K. W. (2023). *Membangun masyarakat: Dinamika kekinian ilmu kesejahteraan sosial*. Penerbit.
- Ramadan, R., & Thomas, A. (2011). Evaluating the impact of reforming the food subsidy program in Egypt: A mixed demand approach. *Food Policy*, 36(5), 638–646. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2011.06.006>
- Rasella, D., Aquino, R., Santos, C. A., Paes-Sousa, R., & Barreto, M. L. (2013). Effect of a conditional cash transfer programme on childhood mortality: A nationwide analysis of Brazilian municipalities. *The Lancet*, 382(9886), 57–64. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60715-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60715-1)
- Shanks, C. B., & Harden, S. (2016). A reach, effectiveness, adoption, implementation, maintenance evaluation of weekend backpack food assistance programs. *American Journal of Health Promotion*, 30(7), 511–520. <https://doi.org/10.4278/ajhp.140116-QUAL-28>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan teoritik - legalistik - empirik - inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.
- Yi, F., Sun, D., & Zhou, Y. (2015). Grain subsidy, liquidity constraints and food security—Impact of the grain subsidy program on the grain-sown areas in China. *Food Policy*, 50, 114–124. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.10.009>